

**PENGARUH REALISASI BELANJA MODAL DAN BELANJA
OPERASI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
PAPUA TAHUN 2015-2018**

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana



AZIF FAISAL ALBARI

1117 29492

Program Studi Akuntansi

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara
Yogyakarta**

2020/2021

SKRIPSI

**PENGARUH REALISASI BELANJA MODAL DAN BELANJA OPERASI
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN PERTUMBUHAN
EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2015-2018**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

AZIF FAISAL ALBARI

No Induk Mahasiswa: 111729492

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 3 Maret 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing I



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

Pembimbing II



Manggar Wulan Kusuma, SE., M.Si., Ak.

Penguji



Rudy Badrudin, Dr., M.Si.

Yogyakarta, 3 Maret 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH REALISASI BELANJA MODAL DAN BELANJA OPERASI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2015-2018

Abstrak: Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, termasuk pengalokasian belanja oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh realisasi belanja modal dan belanja operasi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta dampak pertumbuhan ekonomi tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat pada 28 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua tahun 2015-2018. Dengan pengujian hipotesis menggunakan Partial Least Square, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) Belanja operasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, 3) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: belanja modal, belanja operasi, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat

Abstract: Society welfare can be achieved through economic growth. Many factors influence economic growth, including the allocation of expenditure by local governments. This study aims to analyze the effect of realized capital expenditure and operating expenditure on economic growth, as well as the impact of this economic growth on the welfare of the people in 28 districts and 1 city in Papua Province in 2015-2018. By testing the hypothesis using Partial Least Square, the results show that 1) Capital expenditure has a positive effect on economic growth, 2) Operational expenditure has a positive effect on economic growth, 3) Economic growth has a negative effect on people's welfare.

Keywords: capital expenditure, operational expenditure, economic growth, society welfare

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Menciptakan masyarakat yang sejahtera dan unggul merupakan salah satu tujuan yang telah lama dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Cita-cita tersebut tertulis dalam Mukadimah UUD 1945 alinea ke-4 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada perkembangannya, penilaian kesejahteraan masyarakat suatu wilayah/negara menggunakan berbagai indikator yang berbeda. Menurut Badrudin (2017) pada awalnya tingkat kesejahteraan dalam suatu masyarakat ditentukan dengan tinggi atau rendahnya PDB per kapita sebagai gambaran kemampuan penduduk dalam memperoleh pendapatan. Namun penilaian kesejahteraan yang hanya ditentukan oleh PDB per kapita dianggap terlalu sederhana. Anggapan tersebut mengakibatkan berkembangnya berbagai model penilaian baru sebagai pengukur kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (p. 206).

Indikator IPM atau dalam Bahasa Inggris yaitu *Human Development Index (HDI)* diperkenalkan oleh *United Nations Development Program (UNDP)* pada tahun 1990. Menurut Todaro dan Smith (2015) IPM merupakan ukuran pembangunan sosioekonomi dalam bentuk indeks yang merupakan penggabungan ukuran pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita (p. 51).

Tabel 1.1
Data IPM Indonesia, IPM Provinsi Tertinggi, IPM Provinsi Terendah, IPM Kabupaten/Kota Tertinggi, IPM Kabupaten/Kota Terendah

	Tahun				Rerata pertumbuhan IPM Tahun 2015-2018
	2015	2016	2017	2018	
Provinsi DKI Jakarta	78,99	79,60	80,06	80,47	0,65%
Kota Yogyakarta	84,56	85,32	85,49	86,11	0,69%
Indonesia	69,55	70,18	70,81	71,39	0,89%
Provinsi Papua	57,25	58,05	59,09	60,06	1,43%
Kabupaten Nduga	25,47	26,56	27,87	29,42	3,78%

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sumber: BPS, Data diolah

Dapat dilihat dalam tabel 1.1 bahwa masih terdapat permasalahan dalam pemerataan kesejahteraan di setiap daerah yang terlihat dari gap yang besar antara provinsi yang memiliki IPM tertinggi dan provinsi yang memiliki IPM terendah, serta gap antara kabupaten/kota dengan IPM tertinggi dan terendah juga menunjukkan perbedaan yang sangat besar. Hal tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan kesejahteraan antara daerah yang berada di bagian barat Indonesia (khususnya Pulau Jawa) dengan daerah di wilayah timur Indonesia.

Namun yang menarik seperti yang dilihat dalam tabel 1.1, sebagaimana dijelaskan oleh BPS bahwa pada tahun 2016, 2017, 2018 peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Kabupaten Nduga merupakan yang tertinggi di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari rerata pertumbuhan IPM Provinsi Papua dan Kabupaten Nduga pada tahun 2015-2018 yang menunjukkan peningkatan signifikan yaitu masing-masing sebesar 1,43% dan 3,78%. Meningkatnya IPM tersebut memiliki implikasi bahwa telah terjadi peningkatan pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah memiliki peran sentral dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama sejak berlakunya otonomi daerah dengan diikuti oleh pelaksanaan desentralisasi fiskal yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2001. Menurut Sasana dan Kusuma (2018) melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah dapat menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan diharapkan dapat lebih tanggap terhadap permasalahan kemiskinan di daerahnya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berisi tentang pendapatan daerah dan berbagai pengeluaran daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengalokasikan pengeluaran sesuai dengan diskresi yang dimiliki dengan menyesuaikan kebutuhan di daerah masing-masing. Dalam pengeluaran daerah terdapat dua kategori belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi yakni belanja operasi dan belanja modal. Kedua belanja tersebut apabila dialokasikan secara merata dan tepat sasaran maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan memberi dampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Maulana dan Bowo (2013) menjelaskan Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan total barang dan jasa/output agregat hasil dari kegiatan perekonomian atau Produk Domestik Bruto (PDB). Dijelaskan dalam ilmu makro ekonomi, penghitungan PDB melalui pendekatan pengeluaran ($C+I+G+(X-M)$) berisi berbagai variabel yang salah satunya merupakan pengeluaran Pemerintah (G). sehingga jelas pengalokasian belanja modal (pembangunan) dan belanja operasi (pengeluaran rutin) berpengaruh terhadap perubahan angka PDB. Dan pengalokasian belanja tersebut juga diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian suatu wilayah.

Dalam penyediaan barang publik dialokasikan belanja modal untuk pelaksanaan pembangunan. Kegiatan pembangunan tersebut akan menyebabkan timbulnya permintaan barang/jasa yang akan direspon kemudian oleh produsen untuk penyediaan barang/jasa tersebut. Aktivitas ekonomi tersebut kemudian akan membentuk nilai absolut PDRB dan angka relatif perubahan PDRB yaitu pertumbuhan ekonomi (Badrudin, 2017, p. 21). Dalam pengalokasian belanja operasi untuk konsumsi rutin barang/jasa diharapkan juga dapat melibatkan sektor UMKM. Sehingga meningkatnya kegiatan perekonomian tersebut diikuti dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Meningkatnya kegiatan perekonomian tersebut kemudian akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. UNDP menjelaskan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi tersebut berpengaruh terhadap pembangunan manusia melalui distribusi pendapatan dalam masyarakat, sedangkan kualitas manusia yang baik yaitu dengan pendidikan dan kesehatan yang layak akan menentukan kemampuan masyarakat untuk mengelola serta menyerap berbagai sumber pertumbuhan ekonomi (BPS, 2009, p. 4).

Menurut Badrudin (2017) pertumbuhan ekonomi dikatakan berkualitas apabila pertumbuhan tersebut selaras dengan pembangunan manusia yang lebih tinggi. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan harus berfokus pada aset bangsa serta masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara merata (p. 153). Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberi keleluasaan untuk mengalokasikan belanja pemerintah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah dalam rangka menjalankan segala urusan pemerintahan di luar urusan Pemerintah Pusat. Dengan didukung oleh pemberian berbagai dana transfer keuangan oleh Pemerintah Pusat, diharapkan pemberian dana transfer tersebut dapat dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberdayakan perekonomian masyarakat dan pengentasan kemiskinan di daerah yang akan berdampak kemudian pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas. Peneliti ingin meneliti fenomena meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dalam kurun waktu tahun 2015-2018 apakah peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, dan juga apakah pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh pengalokasian belanja yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dalam kurun waktu tahun 2015-2018.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Agency theory oleh Jensen dan Meckling (1976) didefinisikan sebagai hubungan kontrak antara principals atau pemberi kontrak/wewenang dengan pihak lain (agents) untuk menjalankan jasa bagi mereka dengan memberikan wewenang/otoritas dalam pengambilan keputusan pada agent. Menurut Eisenhardt (1989) masalah keagenan muncul karena adanya perbedaan antara tujuan agent dan principal, dan masalah lainnya adalah principal sulit memastikan apa yang sebenarnya dilakukan agent tersebut, yaitu apakah agent telah berperilaku dengan benar atau tidak. Dalam konteks penelitian ini, hubungan keagenan terjadi pada Pemerintah Pusat sebagai *principal* serta Pemerintah Daerah sebagai *agent*.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal menurut Rochjadi (2006) diartikan sebagai instrumen dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional melalui suatu mekanisme hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga dapat membentuk kondisi perekonomian yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat (dalam Badrudin, 2017, p.39). Menurut Litvack et al (1999) keberhasilan desentralisasi yaitu dampaknya terhadap keadilan di setiap daerah dan masyarakat ditentukan pada aturan kelembagaan dan rancangan kebijakan yang diambil. Jika pemerintah pusat tidak melakukan redistribusi sumber daya ke daerah yang lebih miskin maka desentralisasi fiskal akan menghasilkan perbedaan/kesenjangan yang semakin besar antara daerah kaya dan miskin, begitu juga jika pemerintah lokal tidak melakukan redistribusi pendapatan dalam wilayah kerja mereka maka akan mungkin orang miskin akan kekurangan akses dalam layanan publik.

Pertumbuhan Ekonomi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan oleh Kuznets (1973) sebagai peningkatan kemampuan/kapasitas dalam menyediakan barang-barang ekonomi yang beragam kepada penduduk yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, serta penyesuaian dalam kelembagaan dan ideologi. Menurut Arsyad (2015) pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan aktivitas perekonomian dari tahun ke tahun yang dicerminkan oleh pendapatan nasional. Dalam menghitung pendapatan nasional menggunakan tiga metode yaitu:

1. Pendekatan penghasilan
2. Pendekatan produksi
3. Pendekatan pengeluaran

Pendapatan nasional dengan tiga pendekatan/metode penghitungan tersebut kemudian sering disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDB) (Algifari et al, 2018, p. 25). PDB tersebut berlaku secara nasional, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan PDB dalam lingkup daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, pertumbuhan ekonomi dalam lingkup daerah dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi per tahun} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$$

keterangan:

t = tahun penghitungan pertumbuhan ekonomi

t-1 = tahun sebelum tahun penghitungan pertumbuhan ekonomi

Kesejahteraan Masyarakat

Pada perkembangannya, penilaian kesejahteraan masyarakat suatu wilayah/negara menggunakan berbagai indikator yang berbeda. Dijelaskan oleh Badrudin (2017) pada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

awalnya tingkat kesejahteraan dalam suatu masyarakat ditentukan dengan PDB per kapita sebagai gambaran kemampuan penduduk dalam menghasilkan/memperoleh pendapatan. Namun penilaian dengan hanya ditentukan oleh PDB per kapita dianggap terlalu sederhana. Anggapan tersebut mengakibatkan berkembangnya berbagai model penilaian baru sebagai indikator kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (p. 206).

Menurut Todaro dan Smith (2015) IPM merupakan ukuran pembangunan sosioekonomi dalam bentuk indeks yang merupakan penggabungan ukuran pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita (p. 51). Terdapat tiga komponen dalam IPM yaitu *longevity*, *knowledge*, dan *decent living* (Badrudin, 2017, p. 159). Adapun indikator dalam mengukur ketiga komponen tersebut yakni:

- a. Angka Harapan Hidup (AHH)
- b. Tingkat Pendidikan
- c. Standar Hidup Layak

Dalam menghitung IPM, masing-masing komponen IPM harus dihitung terlebih dahulu dengan formula:

$$\text{Indeks Kesehatan: } \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

$$\text{HLS: } \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$\text{RLS: } \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$\text{Indeks Pendidikan: } \frac{HLS + RLS}{2}$$

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

$$\text{Daya Beli: } \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran})_{\min}}{\ln(\text{pengeluaran})_{\max} - \ln(\text{pengeluaran})_{\min}}$$

Setelah setiap komponen indeks dihitung, langkah selanjutnya adalah penghitungan IPM menggunakan metode agregasi rata-rata geometrik (metode lama menggunakan rata-rata aritmatik)

$$\text{IPM: } \sqrt[3]{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan} \times I \text{ pengeluaran}} \times 100$$

Belanja Daerah

Bersumber pada UU No. 33 Tahun 2004, dijelaskan bahwa belanja daerah merupakan segala kewajiban daerah dalam suatu periode tahun anggaran yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010, belanja dikelompokkan berdasarkan klasifikasi ekonomi yaitu:

A. Belanja Operasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010, secara garis besar belanja operasi merupakan realisasi anggaran Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan rutin (sehari-hari) yang memberi manfaat dalam jangka pendek meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

B. Belanja Modal

Merujuk pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja modal secara garis besar didefinisikan sebagai pengeluaran yang dianggarkan untuk pembangunan dan pengadaan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang dapat berupa tanah, mesin, peralatan, gedung, irigasi, jalan, serta aset tetap lainnya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengembangan Hipotesis

Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Dijelaskan oleh Todaro dan Smith (2015) investasi penunjang berupa infrastruktur ekonomi dan sosial seperti fasilitas transportasi (jalan, pelabuhan, dll), irigasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan serta fasilitas lainnya akan berfungsi dalam mendukung peningkatan output produksi yang dihasilkan dari investasi produktif berupa peningkatan modal fisik (p. 149). Dalam penyediaan barang publik berupa berbagai infrastruktur tersebut dialokasikan belanja modal oleh Pemerintah sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 untuk pelaksanaan pembangunan.

Selain itu dalam era desentralisasi fiskal sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2001, Provinsi Papua menerima status otonomi khusus dari Pemerintah Pusat dengan tujuan salah satunya mempercepat pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat asli Papua, maka sesuai prinsip "*Finance Follow Function*" Pemerintah Pusat memberikan transfer keuangan berupa Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk pembangunan infrastruktur dan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) yang dialokasikan terutama untuk sektor kesehatan dan pendidikan (UU No. 21 Tahun 2001).

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga pemberian bantuan transfer keuangan oleh Pemerintah Pusat tersebut akan meningkatkan alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial oleh Pemerintah Daerah. Pembangunan tersebut selain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan permintaan barang dan jasa juga diharapkan akan memberikan *multiplier effect* yaitu untuk mendukung peningkatan output produksi yang disediakan oleh pihak swasta, serta akan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tercipta efektivitas dan efisiensi dalam pelbagai sektor sehingga masyarakat Papua akan lebih produktif yang kemudian akan meningkatkan kegiatan perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Argumen peneliti tersebut didukung dengan penelitian Putri (2014) bahwa dengan meningkatnya alokasi belanja modal sebesar 1% dapat berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada seluruh Provinsi di Pulau Jawa sebesar 0,31% pada tahun 2007-2011, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Badrudin dan Siregar (2015), Winarni, Ahmad, dan Suharno (2020), Rizky, Agustin, dan Mukhlis (2016) juga menyatakan hasil yang sama yaitu terdapat pengaruh positif antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian rumusan hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu:

H1: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Operasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Badrudin (2017) belanja operasi untuk membayar gaji dan honorarium pegawai akan menjadi pendapatan bagi pegawai tersebut, kemudian oleh pegawai pendapatan tersebut dialokasikan untuk kegiatan konsumsi barang/jasa yang kemudian akan menimbulkan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi tersebut kemudian akan membentuk nilai absolut PDRB dan angka relatif perubahan PDRB yaitu pertumbuhan ekonomi (p. 20). Pengalokasian belanja operasi untuk konsumsi rutin barang/jasa Pemerintah selain akan menimbulkan kegiatan perekonomian, diharapkan juga dapat melibatkan sektor UMKM dan perusahaan lokal. Sehingga meningkatnya kegiatan perekonomian tersebut diikuti dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa meningkatnya alokasi belanja operasi oleh Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kegiatan perekonomian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, maka rumusan hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu:

H2: Belanja Operasi berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan produksi barang/jasa, serta meningkatnya pengeluaran oleh pelaku ekonomi dalam suatu wilayah. Meningkatnya pendapatan masyarakat tersebut dapat dialokasikan oleh masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan pokok/dasar yang berkaitan dengan kebutuhan atas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembelian berbagai bahan sembako, sanitasi, rumah yang layak dan kebutuhan dasar lainnya sehingga berdampak pada meningkatnya indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan pengeluaran perkapita disesuaikan yang merupakan komponen IPM sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Argumen tersebut seperti yang dijelaskan oleh UNDP bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pembangunan manusia melalui distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat (BPS, 2009, p. 4).

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, peneliti menduga bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Argumen peneliti tersebut didukung dengan beberapa hasil kajian empiris yaitu penelitian Dewi dan Sutrisna (2014), Adelfina

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan Jember (2016), Komariah, Yogiartoro, dan Hukom (2019), Arifin, Maipita, dan Hutasukut (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian rumusan hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu:

H3: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat

METODE PENELITIAN

Sampel Penelitian

Pada penelitian ini, teknik dalam pengambilan sampel adalah teknik sensus atau sampling jenuh yaitu dengan menggunakan keseluruhan elemen populasi sebagai sampel (Sugiyono, 2016, p. 7). Populasi penelitian dalam penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Papua pada tahun 2015-2018 berjumlah 29 Kabupaten/Kota.

Definisi Operasional dan Jenis Variabel

Tabel 3.1
Definisi Operasional dan Jenis Variabel

	Variabel	Nama Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
1	Eksogen (Bebas)	Belanja Modal	Belanja modal yaitu pengeluaran dalam rangka pengadaan dan pembangunan aset yang memiliki umur manfaat 1 tahun/12 bulan.	Angka belanja modal dalam laporan realisasi APBD (Rupiah)

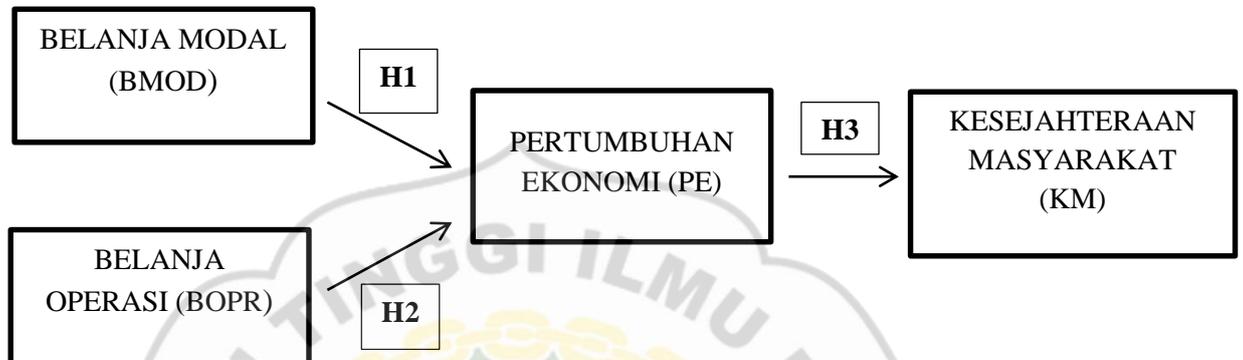
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2	Eksogen (Bebas)	Belanja Operasi	<p>Belanja operasi merupakan realisasi anggaran untuk kegiatan rutin/operasional pemerintah yang memberi manfaat dalam jangka pendek berkaitan dengan pemberian layanan masyarakat.</p>	<p>Penjumlahan angka belanja pegawai, barang/jasa, biaya bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial dalam laporan realisasi APBD (Rupiah)</p>
3	Intervening (Mediasi)	Pertumbuhan Ekonomi	<p>Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan aktivitas perekonomian dari tahun ke tahun yang dicerminkan oleh perubahan relatif PDB/PDRB.</p> $\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$ <p>keterangan:</p> <p>t = tahun penghitungan pertumbuhan ekonomi</p> <p>t-1 = tahun sebelum tahun penghitungan pertumbuhan ekonomi</p>	<p>Angka laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (Persen)</p>
4	Endogen (Terikat)	Kesejahteraan Masyarakat	<p>Variabel kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator IPM. Menurut Badrudin (2017) model penilaian baru dalam menentukan kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu IPM (p. 206).</p> <p>Rumus dalam menghitung IPM yaitu:</p> $\sqrt[3]{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan} \times I \text{ pengeluaran}} \times 100$ <p>keterangan:</p> <p>I kesehatan = Indeks Kesehatan</p> <p>I pendidikan = Indeks Pendidikan</p> <p>I pengeluaran = Indeks Pengeluaran/Daya Beli</p>	<p>Angka IPM Metode Baru (Indeks)</p>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Model Penelitian

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran digambarkan dengan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 3.1
Model Penelitian

Metode dan Teknik Analisis

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan dalam mendeskripsikan fenomena atau mengetahui karakteristik umum data penelitian berupa tendensi sentral (*modus, median, mean*), deviasi standar, *maximum, minimum*, dan *count* (Hartono, 2016, p.195-199). Dalam penelitian ini pengolahan statistik deskriptif menggunakan software *Microsoft Excel 2016*.

Statistik Induktif dengan PLS/*Partial Least Square*

Dalam pembuktian hipotesis, peneliti menggunakan teknik PLS yang merupakan model persamaan struktural (SEM) berbasis varian dengan menggunakan software WarpPLS 7.0. Dalam penggunaannya, penggunaan teknik PLS terdiri atas 2 tahapan yaitu evaluasi *outer* dan *inner model*.

- a. Pengujian *outer model*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Merupakan model pengukuran untuk evaluasi validitas dan reliabilitas setiap variabel laten. Karena penelitian ini menggunakan variabel observed/variabel yang diukur secara langsung, maka penelitian ini tidak memerlukan pengujian *outer model* (Ghozali dan Latan, 2015, p. 236).

b. Pengujian inner model

Pada tahap ini, diperoleh berbagai indikator *goodness of fit* dalam menilai model secara menyeluruh serta hasil *path coefficient* dan tingkat signifikansi/*p-value* dalam penarikan kesimpulan atas hasil uji hipotesis (Sholihin dan Ratmono, 2013, p. 14).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Deskripsi obyek penelitian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2015-2018

	Belanja Modal (rupiah)	Belanja Operasi (rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Masyarakat
Maksimum	818.737.871.800	1.688.952.412.692	13,51%	79,58
Minimum	45.531.533.345	441.783.215.447	-4,57%	25,47
Standar Deviasi	132.405.030.917	237.899.376.335	2,16%	11,67
Rata-rata	313.030.817.384	760.042.180.481	6,23%	55,37
Total Sampel	116	116	116	116

Sumber: Data diolah, 2021.

Statistik Induktif dengan Partial Least Square (PLS)

Evaluasi Inner Model/Model Fit

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tahap pertama analisis induktif dengan PLS pada penelitian ini adalah menilai *model fit and quality indices* dalam mengetahui kesesuaian model penelitian yang digunakan. Hasil *model fit and quality indices* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2
Hasil Uji Model Fit and Quality Indices

APC = 0.266, P value < 0.001	Good if P value < 0.05
ARS = 0.157, P value = 0.021	Good if P value < 0.05
AVIF = 1.144	Acceptable if < 5

Sumber: Data diolah, WarpPLS 7.0, 2021

Merujuk pada hasil uji dalam tabel 4.2, maka model dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, pada variabel eksogen dan endogen diantara keduanya terdapat hubungan sebab akibat baik hubungan langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai APC sebesar 0,266 dengan nilai $P < 0,001$ yang berarti APC signifikan (Good if $P < 0,05$).
2. Dalam penelitian ini, didapatkan nilai ARS sebesar 0,157 dengan nilai $P = 0,021$. Nilai $P = 0,021$ menunjukkan nilai ARS signifikan karena nilai $P < 0,05$ (Good if $P < 0,05$), sedangkan nilai 0,157 menunjukkan bahwa variabel endogen dalam penelitian ini hanya mampu dipengaruhi oleh variabel eksogen sebesar 15,7% sedangkan sebesar 84,3% dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya di luar model penelitian.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Dalam penelitian ini, nilai AVIF sebesar 1,144 dapat diterima karena memiliki nilai dibawah 5 (Acceptable if < 5). Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel eksogen dalam model penelitian ini

Uji Hipotesis

Setelah pengujian *model fit*, langkah berikutnya adalah pengujian pada hipotesis yang telah diajukan. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis Penelitian	Koefisien Jalur	P-Value	Prediksi	Hasil	R ²	Keputusan
BMOD → PE (H1)	0,45	< 0,01*	+	+	0,28	Diterima
BOPR → PE (H2)	0,16	0,04*	+	+	0,28	Diterima
PE → KM (H3)	-0,19	0,02*	+	-	0,04	Tidak Diterima

Keterangan: *signifikan karena P-Value $< \alpha = 5\%$
Sumber: Data diolah, WarpPLS 7.0, 2021

Pembahasan

Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasar pada hasil uji hipotesis, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 (H1) yang diajukan oleh peneliti dapat diterima. yaitu pengalokasian belanja modal dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) oleh masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Papua secara signifikan dapat memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh signifikan tersebut, salah satunya disebabkan oleh adanya Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dan Dana Otsus yang merupakan pemberian transfer keuangan oleh Pemerintah Pusat dalam

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

rangka mendanai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua. Bantuan dalam pembiayaan infrastruktur tersebut, akan meningkatkan alokasi belanja modal dalam rangka pembangunan infrastruktur.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut seperti fasilitas transportasi (jalan, pelabuhan, dll), irigasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan serta fasilitas lainnya, selain akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan permintaan atas barang dan jasa (Badrudin, 2017, p. 21), juga dapat memberi *multiplier effect* bagi perekonomian daerah, yaitu dalam mendukung peningkatan output produksi yang dihasilkan dari investasi produktif berupa peningkatan modal fisik oleh sektor swasta (Todaro dan Smith, 2015, p. 149), serta akan menciptakan efisiensi dan efektivitas diberbagai sektor yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat (Deviani, 2016).

Temuan dalam penelitian ini juga mendukung hasil penelitian dari beberapa kajian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Badrudin dan Siregar (2015), Winarni, Ahmad, dan Suharno (2020), Rizky, Agustin, dan Mukhlis (2016), dan Putri (2014) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa belanja modal secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja Operasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasar pada hasil uji hipotesis, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 (H2) yang diajukan oleh peneliti dapat diterima. Pengaruh positif dan signifikan tersebut dapat disebabkan karena, alokasi belanja operasi yang dikeluarkan masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2015-2018

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

cukup tinggi dan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Tingginya alokasi belanja tersebut dapat dilihat pada rerata pengalokasian belanja operasi tahun 2015-2018 yang menunjukkan angka sebesar Rp760.042.180.481.

Meningkatnya belanja operasi yaitu alokasi belanja barang dan jasa pemerintah berkaitan dengan konsumsi rutin barang/jasa pemerintah akan meningkatkan perekonomian suatu daerah. selain itu, apabila belanja tersebut melibatkan UMKM serta perusahaan lokal, maka pengalokasian belanja tersebut dapat berdampak pada pemberdayaan perekonomian masyarakat suatu daerah. Meningkatnya alokasi belanja pegawai, yang berarti merupakan peningkatan pendapatan bagi pegawai tersebut diasumsikan akan meningkatkan konsumsi barang/jasa bagi pegawai tersebut. dengan meningkatnya konsumsi pegawai/masyarakat tersebut maka akan berpengaruh pada meningkatnya kegiatan perekonomian suatu daerah.

Selain itu, tujuan pemberian subsidi berupa bantuan biaya produksi bagi produsen barang/jasa yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat adalah agar harga jual barang produksi tersebut dapat terjangkau oleh masyarakat, sedangkan pemberian bantuan sosial berupa bantuan keuangan pada masyarakat khususnya masyarakat miskin diharapkan dapat meningkatkan daya beli mereka. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan harga barang/jasa yang lebih terjangkau, maka diharapkan konsumsi masyarakat atas barang/jasa tersebut dapat meningkat, yang kemudian akan berdampak pada peningkatan kegiatan perekonomian suatu daerah.

Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasar pada hasil uji hipotesis, temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 (H3) yang diajukan oleh peneliti tidak diterima. Peneliti memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2015-2018 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua secara signifikan akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Namun temuan yang didapat justru menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu pertumbuhan ekonomi tersebut justru memberi pengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil yang didapat oleh penelitian Badrudin dan Siregar (2015) serta Arini (2016) namun tidak mendukung penelitian Adelfina dan Jember (2016), Komariah, Yogiandoro, dan Hukom (2019), Dewi dan Sutrisna (2014), Arifin, Maipita, dan Hutasuhut (2020) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara signifikan pertumbuhan ekonomi dapat memberi pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penjelasan logis atas pengaruh negatif tersebut dapat saja terjadi karena pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua masih bersifat eksklusif. Merujuk pada RPJMD 2019-2023, dijelaskan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Papua kurang memberi dampak signifikan terhadap percepatan penurunan kemiskinan, hal tersebut disebabkan pertumbuhan ekonomi tersebut lebih dinikmati penduduk berpenghasilan tinggi dibanding penduduk berpenghasilan rendah, sehingga dampak dari perekonomian belum optimal dalam mendorong pendapatan masyarakat miskin di atas garis kemiskinan (p. II 55).

Seperti yang dijelaskan oleh UNDP, bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pembangunan manusia melalui distribusi pendapatan dalam

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

suatu masyarakat (BPS, 2009, p. 4). Apabila meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat mendorong pendapatan masyarakat miskin, maka pendapatan beberapa masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan tersebut akan berdampak pada menurunnya kemampuan masyarakat untuk mengakses berbagai kebutuhan pokok/dasar yang berkaitan dengan kebutuhan atas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembelian berbagai bahan sembako, sanitasi, rumah yang layak, dll. Sehingga akan berdampak pada menurunnya indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan pengeluaran perkapita disesuaikan yang merupakan komponen IPM sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

Temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Provinsi Papua belum tercapai. Menurut Litvack et al (1999) keberhasilan desentralisasi yaitu dampaknya terhadap keadilan di setiap daerah dan masyarakat ditentukan pada aturan kelembagaan dan rancangan kebijakan yang diambil. Jika pemerintah lokal tidak melakukan redistribusi pendapatan dalam wilayah kerja mereka maka akan mungkin orang miskin akan kekurangan akses dalam layanan publik.

Merujuk pada teori keagenan, menurut Eisenhardt (1989) salah satu masalah dalam hubungan keagenan adalah *principal* sulit memastikan apa yang sebenarnya dilakukan *agent* tersebut, yaitu apakah *agent* telah berperilaku dengan benar atau tidak. Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2001, Provinsi Papua menerima status otonomi khusus dari Pemerintah Pusat dengan tujuan percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat asli Papua yang didukung dengan pemberian Dana Otsus dan DTI. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat sulit memastikan apakah berbagai dana transfer

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tersebut sudah dialokasikan dengan tepat oleh Pemerintah Daerah baik dalam bentuk belanja modal maupun operasi yang bertujuan agar pembangunan yang dirasakan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat asli Papua.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Beberapa kesimpulan yang didapat merujuk pada hasil analisis serta pembahasan yakni:

1. Belanja modal dan belanja operasi masing-masing memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga meningkatnya alokasi belanja modal dan belanja operasi akan berdampak terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi memberi pengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, yang berarti meningkatnya pertumbuhan ekonomi justru akan menurunkan kesejahteraan pada masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena Pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang masih eksklusif sehingga meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja dan penurunan kemiskinan serta dampaknya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Saran

Penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya. Keterbatasan pada penelitian ini menurut peneliti yaitu:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Seiring berjalannya waktu penelitian, peneliti menyadari bahwa menilai pertumbuhan ekonomi hanya melalui belanja pemerintah dan menilai kesejahteraan masyarakat hanya melalui pertumbuhan ekonomi belum memberi gambaran yang komprehensif tentang kondisi perekonomian dan kondisi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua.

Berdasar pada keterbatasan tersebut, maka untuk saran penelitian berikutnya:

1. Dapat menggunakan indikator lainnya dalam menilai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di Papua akan menarik minat swasta untuk berinvestasi, dengan adanya investasi swasta tersebut akan dapat menyerap tenaga kerja dan akan meningkatkan output produksi yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
2. Dapat menggunakan indikator lainnya dalam menilai kesejahteraan masyarakat yakni pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Anggaran dalam bidang pendidikan akan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah sehingga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, alokasi anggaran pada bidang kesehatan berkaitan tersedianya berbagai fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang berkualitas akan dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup. Kemudian alokasi anggaran dalam bidang infrastruktur akan berdampak pada lancarnya kegiatan perekonomian masyarakat yang kemudian berdampak pada meningkatnya konsumsi riil per kapita.

DAFTAR PUSTAKA

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Adelfina, & Jember, I. M. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005 - 2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 05(10), 1011-1025.
- Algifari, Purnamawati, A., Setyowati, E., Damayanti, R., Badrudin, R., Fatmawati, S., et al. (2018). *Ekonomi Makro Pengantar* (3rd ed.). Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Amindoni, A. (2018, January 15). BBC News Indonesia. Retrieved February 10, 2021, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42646288>
- Arifin, Z., Maipita, I., & Hutasuhut, S. (2020). The Effect of Capital Expenditure and Economic Growth on The Human Development Index of The District / City in North Sumatera. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 7(1), 585-594.
- Arini, P. R. (2016). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 180-198
- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan* (2nd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2009). *Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks Pembangunan Manusia 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020, Oktober 09). Diambil kembali dari <https://papua.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab5>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 29 Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha se-Provinsi Papua Tahun 2015-2019*. Jayapura: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 29 Kabupaten/Kota Menurut Pengeluaran se-Provinsi Papua Tahun 2015-2019*. Jayapura: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah* (2nd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badrudin, R., & Siregar, B. (2015). The evaluation of the implementation of regional autonomy in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 1-11.
- Bahl, R. (1999). *Implementation Rules for Fiscal Decentralization*. Atlanta: Georgia State University.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Bergman, M., & Lane, J. E. (1990). Public Policy in a Principal-Agent Framework. *Journal of Theoretical Politics* , 339-352.
- Bird, R. M. (1993). Threading the Fiscal Labyrinth: Some Issues in Fiscal Decentralization. *National Tax Journal*, 207-227.
- Deviani. (2016). Analisis Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan (Studi Empiris Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat). *Jurnal Pendidikan Ekonomi & Bisnis*, 08(1), 1-13.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. (2020, Oktober 07). Diambil kembali dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 57-74.
- Ferris, J. A., & Graddy, E. A. (1998). A Contractual Framework for New Public Management Theory. *International Public Management Journal*, 1(2), 225-240.
- Halim, A. (2008). Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah (1st ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hartono, J. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman Pengalaman (6th ed.). Yogyakarta: BPFE UGM.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305-360.
- Komariah, D., Yogiandoro, M., & Hukom, A. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*, 4(S1), 523-532.
- Kuznets, S. (1973). Modern Economic Growth: Findings and Reflections. *American Economic Review*, 247-258.
- Litvack, J., Ahmad, J., & Bird, R. (1998). Rethinking Decentralization in Developing Countries. Washington DC: World Bank.
- Malizia, E. E. (1986). Economic Development in Smaller Cities and Rural. *Journal of the American Planning Association*, 489-499.
- Maulana, R., & Wibowo, P. A. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi terhadap IPM Provinsi di Indonesia 2007-2011. *Journal of Economics and Policy*, 103-213.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1-15.
- Oates, W. E. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, 46(2), 237-243.
- Provinsi Papua. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023
- Putri, P. I. (2014). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal, dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 109-120.
- Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 8(1), 9-16.
- Ross, S. A. (1973). The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem. *American Economic Review*, 63, 134-139.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.02/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- Sasana, H., & Kusuma, P. (2018). Government Expenditure and Poverty in Indonesia. *International Conference on Economics, Business and Economic Education 2018*, 142-153.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Andi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Siddik, M. (2009). Kebijakan Awal Desentralisasi Fiskal 1999-2004. In A. Abimanyu, & A. Megantara, Era Baru Kebijakan Fiskal (pp. 539-560). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Smith, R. W., & Bertozzi, M. (1998). Principals and agents: an explanatory model for public budgeting. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 10(3), 325-353.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tanzi, V. (1996). Fiscal Federalism and Decentralization: A Review of Some Efficiency and Macroeconomic Aspects. World Bank.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). New York: Pearson Education.
- UNDP. 1990. Human Development Report 1990: Concept and Measurement of Human Development. New York. <http://www.hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1990>
- Winarni, E., Ahmad, A. A., & Suharno. (2020). Pengaruh Investasi dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 447-450.